

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pendekatan Pendidikan Responsif Gender di Kabupaten Sumenep

AH. Mansur

Institut Agama Islam AL-Azhaar Lubuk Linggau Indonesia

ahmansur@iai-al-azhaar.ac.id

Mufiqur Rahman

IAI AL-Khairat Pamekasan

mufiqurrahman@alkhairat.ac.id

Muhammad Tang

Muhammادتang.mt78@gmail.com

STAI Al-Furqan Makassar

Abstract

This article aims to discuss increasing the human development index through a gender-responsive education approach. This article uses a library research approach with content analysis techniques. The results showed that the HDI of Sumenep Regency was still relatively low, namely that males were at 72.32% while females were at 58.38%. This figure illustrates that there are still significant differences between males and females. One of the indicators is the school average of 6.60% for boys and 4.63% for girls. This fact is still detrimental to women. Then the Gender Empowerment Index (IDG) in Sumenep is 60.99% better than other districts in Madura. IDG Sumenep data from 2010 to 2019 shows a fairly good increase, even better than other districts in Madura. However, this gap is still a development problem in the field of education in Sumenep. This study shows the revitalization of the human development agenda in the field of gender responsive education, especially in rural areas and islands. Development challenges in Sumenep are still faced with cultural praxis, some of which are not yet in favor of gender equality. The Sumenep government should be able to increase the human development index through gender responsive education, by making this study a recommendation to the relevant agencies. One of them is revitalizing the role of the education board, by optimizing the function of the education board as an advisory agency, supporting agency, controlling agency, and mediating agency.

Keywords: *Human Development Index (IPM), Gender Empowerment Index (IDG), Gender responsive education*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang peningkatan indeks pembangunan manusia melalui pendekatan pendidikan responsif gender. Artikel ini menggunakan pendekatan *library research* dengan teknik konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM kabupaten Sumenep masih relatif rendah yaitu laki-laki berada pada angka 72.32 % sementara perempuan 58.38 % angka ini menggambarkan bahwa masih terjadi perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu indikatornya adalah rata-rata sekolah laki-laki 6.60 % dan perempuan 4.63%. Fakta ini masih merugikan perempuan. Kemudian indeks pemberdayaan Gender (IDG) di Sumenep adalah 60.99% lebih baik dari kabupaten lainnya di Madura. data IDG Sumenep dari 2010 sampai 2019 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, bahkan lebih baik dari kabupaten lain di Madura. Kendati demikian kesenjangan ini masih menjadi persoalan pembangunan dalam bidang pendidikan di Sumenep. Studi ini menunjukkan revitalisasi agenda pembangunan manusia di bidang pendidikan yang responsif gender, terutama di wilayah perdesaan dan kepulauan. Tantangan pembangunan di Sumenep masih dihadapkan pada praksis budaya yang sebagian diantaranya belum berpihak pada kesetaraan gender. Pemerintah Sumenep seyogyanya dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui jalur pendidikan responsive gender, dengan menjadikan kajian ini sebagai rekomendasi kepada dinas terkait. Salah satunya adalah merevitalisasi peran dewan pendidikan, yaitu mengoptimalkan fungsi dewan pendidikan sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency*, dan *mediating agency*.

Kata kunci: *Indek Pembangunan manusia (IPM), indek pemberdayaan Gender (IDG), Pendidikan responsive gender*

Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur dengan beberapa parameter, dan yang paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).¹ Pembangunan manusia menjadi masalah besar di kawasan Madura. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) empat kabupaten di kawasan ini adalah yang terendah di Jawa Timur, dan lebih dari 21.46% masyarakatnya hidup dalam kemiskinan.² Soal Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumenep menjadi diskursus dan perhatian media massa sejak lima tahun yang lalu. Sumenep pada tahun 2017 yang lalu menjadi kabupaten dengan peringkat 36 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur.³ Salah satunya adalah indeks pembangunan manusia (IPM) di Sumenep masih relatif rendah, yaitu 62,38 poin.

Fakta ini menunjukkan upaya pemerintah dalam pembangunan manusia di kabupaten dengan sumberdaya alam yang terbaik di Madura ini belum maksimal. Walaupun sampai hari ini pemerintah kabupaten Sumenep masih terus melakukan upaya peningkatan pada seluruh sektor pembangunan, terutama pada sektor perbaikan system pendidikan formal dan nonformal yang menjadi fokus kerja pemerintah.⁴ Perbaikan di sektor pendidikan yang dimaksud adalah di antaranya berkaitan dengan program peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi pendidik, dan penyediaan fasilitas sarana pendidikan yang lengkap.⁵

Fokus pemerintah Kabupaten Sumenep pada pendidikan tidak bisa dilepaskan dari IPM di Sumenep yang perlu mendapat perhatian khusus, bahwa pendidikan menjadi faktor penting dalam pembangunan manusia, walaupun untuk mengukur capaian pembangunan manusia juga dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pendidikan (pengetahuan), dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pendidikan digunakan gabungan

¹ Suwandi, *Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Kesehatan Melalui Program "Mawar Iteng" Di Kabupaten Pematang* (Prosiding seminar nasional dan call for papers Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 2019), 596.

² Badan Pusat Statistik (BPS). (2016), *Indeks Pembangunan Manusia 2012-2014*. BPS, Jakarta

³ Baca <https://mediamadura.com/2017/01/17/mengejutkan-indek-pembangunan-manusia-di-sumenep-terendah-di-jawa-timur/>

⁴ Baca <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/332880/genjot-pembangunan-sumenep-bupati-fauzi-bidik-sektor-pendidikan>

⁵ Ibid

indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah,⁶ termasuk juga pemerataan pendidikan dalam konteks responsif kesetaraan gender.⁷

Maka jika indikatornya adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, kemudian juga pemerataan pendidikan dalam konteks responsif gender maka dalam analisis sementara penulis, pemerintah seyogyanya melakukan gerakan dan terobosan di tiga indikator penting tersebut, dengan membuat gerakan *education for all* atau pendidikan untuk semua atau lebih focus lagi pada pendidikan responsive gender. Dengan kebijakan dan peraturan daerah, pemerintah dapat melakukan pola pendidikan yang ramah terhadap kaum difabel, membangun akses pendidikan dari desa melalui kelompok belajar untuk masyarakat (taman baca masyarakat) dan juga yang tidak kalah penting pemberdayaan perempuan sehingga mengurangi angka perempuan putus sekolah.⁸

Kondisi kontras yang terlihat pada pembangunan laki-laki dan perempuan merefleksikan adanya disparitas pembangunan manusia berbasis gender di tingkat kabupaten/kota. Kondisi ini penting menjadi perhatian pemerintah daerah agar melakukan berbagai upaya percepatan pembangunan pada penduduk perempuan melalui program-program otonomi daerah. Dengan demikian, capaian pembangunan yang merata dan berkeadilan dapat segera diperoleh dengan tingkat kesenjangan gender yang dapat ditekan seminimal mungkin. Pembangunan berbasis gender merupakan salah satu amanat yang termaktub dalam berbagai regulasi, terutama telah menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Strategis RPJMN Tahun 2015-2019⁹

Dalam konteks Sumenep, dalam laporan penelitian Ismi Aulil Wardani tahun 2019 menyatakan bahwa pendidikan perempuan di kepulauan Sumenep relatif sangat rendah. Ismi menyebutnya dengan modal manusia sebagai salah satu faktor yang di dalamnya terdapat pendidikan dan keterampilan. Faktor pendidikan perempuan dapat dijelaskan sekitar 11,402%. Variabel pendidikan ini memiliki nilai rendah sehingga perempuan di kepulauan Sumenep relatif kecil jumlah perempuan yang memiliki keterampilan,¹⁰ karena dengan pendidikan seseorang bisa dengan mudah mengasah atau memperbanyak

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS). (2016), Indeks Pembangunan Manusia 2016. BPS, Jawa Timur

⁷ Iklilah Muzayyanah Dini, et.al, *Pembangunan manusia berbasis gender 2020* (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020), 55.

⁸ Baca <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/22/nadiem-makarim-perempuan-lebih-rentan-putus-sekolah-di-masa-pandemi-covid-19>

⁹ Iklilah Muzayyanah Dini, et.al, *Pembangunan manusia berbasis gender 2020* (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020), 55.

¹⁰ Umumnya mereka hanya memasak, menjemur ikan dan mencari kerang.

keterampilan yang dimiliki. Sehingga perempuan di kepulauan hidupnya sangat tergantung kepada penghasilan suami. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa keberterahan hidup perempuan di kepulauan bergantung secara dominan kepada finansial.¹¹

Persoalan pendidikan perempuan secara sosiologis di kepulauan Sumenep menurut pandangan penulis, menambah catatan persoalan pembangunan manusia yang perlu disikapi secara cepat dan tegas dalam rangka mempercepat program pembangunan di Sumenep, dengan mensukseskan pendidikan perempuan sesuai dengan jenjang pendidikan usia sekolah. Biasanya dikelompokkan ke dalam empat kelompok umur, yaitu 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SMP), 16-18 tahun (SMA), dan 19-24 tahun (Perguruan Tinggi). Perkiraan penduduk usia sekolah (7-24 tahun).¹²

Dalam konteks pembangunan daerah diperlukan keterlibatan dan partisipasi peran lembaga pemerintahan dan masyarakat termasuk di dalamnya, lembaga dewan pendidikan daerah yang juga berfungsi untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.¹³

Dewan Pendidikan Kabupaten juga memiliki peran penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tersebut dengan aktif menjadi pengawas dan mendukung pemerintah melakukan kajian dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menjaga mutu pendidikan di daerah termasuk peningkatan pendidikan pada aspek perempuan.

Maka, melalui fakta empirik dan kajian penelitian sebelumnya mengantarkan kajian ini akan membahas secara spesifik tentang bagaimana indeks pembangunan manusia di kabupaten Sumenep dapat dilakukan melalui sektor pendidikan dengan pendekatan pendidikan responsif Gender. Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah, makalah ini secara khusus ingin menjawab permasalahan utama secara deskriptif, dan interpretatif, *pertama* bagaimana Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten

¹¹ Ismi Aulil Wardani, et.all, *Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Bertahan Hidup Perempuan Pulau Di Desa Gedugan, Pulau Giligenting, Kabupaten Sumenep* (SEPA : Vol. 16 No.1 September 2019), 50.

¹² Widharto, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional Indonesia: Peran-serta Pustakawan Dalam Mencerdaskan Bangsa* (Jurnal Perpustakaan Pertanian, V o l . 1 4 N o . 3 & 4 T a h u n 2 0 0 7), 154.

¹³ Baca Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan khususnya dalam pasal 192 ayat (2), (3), (4), dan (5). Ayat (2).

Sumenep, *kedua* bagaimana Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Sumenep, *ketiga* bagaimana Peran Dewan Pendidikan daerah dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Sumenep.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan analisis isi/konten menggunakan sumber buku primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah buku Pembangunan manusia berbasis gender 2020 yang ditulis oleh Iklilah Muzayyanah Dini, yang diterbitkan di Jakarta oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian sumber lainnya seperti Luciana Castella, dkk, dengan judul *Equity in education: a general overview*. Dengan mendialogkan sebuah temuan penelitian dengan teori di atas.

Hasil dan Pembahasan

Kajian akademis tentang peningkatan indeks pembangunan manusia melalui jalur pendidikan pernah dilakukan antara lain adalah Ismi Aulil Wardani dkk pada tahun 2019. Ismi dan timnya melakukan penelitian tentang *faktor Yang Mempengaruhi Strategi Bertahan Hidup Perempuan Pulau Di Desa Gedugan, Pulau Giligenting, Kabupaten Sumenep* yang diterbitkan di jurnal SEPA : Vol. 16 No.1 September 2019.

Penelitian Ismi dkk bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi bertahan hidup yang ada di Desa Gedugan Pulau Giligenting dan menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi dengan strategi bertahan hidup perempuan pulau. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner (skala likert), observasi dan wawancara. Metode pengambilan sampling yang digunakan adalah random sampling dengan slovin. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah modal finansial, modal sosial, modal alam, modal fisik dan modal manusia, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis faktor dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling mendominasi dan paling berpengaruh terhadap strategi bertahan hidup Perempuan Pulau adalah modal finansial.¹⁴

¹⁴ Ismi Aulil Wardani, et.all, *Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Bertahan Hidup Perempuan Pulau Di Desa Gedugan, Pulau Giligenting, Kabupaten Sumenep* (SEPA : Vol. 16 No.1 September 2019), 50.

Penelitian Ismi dkk akan memberikan data penting bagi penulis dalam faktor pendidikan bagi perempuan di kepulauan, sehingga penulis dapat melakukan tindak lanjut dan pola pendidikan yang dapat meningkatkan indek pembangunan manusia secara epistemologis..

Selain Ismi dkk, penelitian lainnya seperti Suwandi, menulis laporan penelitian yang berjudul Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Kesehatan Melalui Program “*Mawar Iteng*” Di Kabupaten Pematang. Peneliti Suwandi mendeskripsikan strategi peningkatan IPM melalui sektor kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan IPM sektor kesehatan melalui program “*Mawar Iteng*” dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI) melalui kegiatan : kelas ibu hamil, fasilitasi rumah tangga kelahiran/persalinan, peningkatan kompetensi bidan serta pembinaan desa siaga.¹⁵ Walaupun penelitian ini tidak membahas peningkatan IPM melalui sector pendidikan namun tetap memberikan petunjuk (*guide*) bagi penulis untuk mencari pola yang sama dalam sector pendidikan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Dini Damayanti dan Fitria Rismaningtyas dengan judul pendidikan berbasis responsif gender sebagai upaya meruntuhkan segregasi gender tahun 2021 penelitian ini menganalisis pendidikan yang responsif gender dengan teori konstruksi sosial. Penelitian ini menemukan pendidikan responsif gender harus dilakukan oleh semua pihak dengan metode *collaborative learning*.¹⁶ Penelitian ini secara spesifik membahas tentang pendidikan responsive gender namun tidak membahas bagaimana korelasinya secara langsung dengan IPM. Namun penelitian dapat memberi petunjuk secara teoritis dan ontologis.

Kemudian, Rizka Eliyana Maslihah, tahun 2018 melaporkan hasil penelitiannya berjudul Nilai Responsif Gender dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Rizka menemukan diskriminasi gender dalamstereotype yang terdapat dalam buku bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyyah yaitu pada penggunaan kosa kata dan *dhomir mudzakkar muannats* secara adil dan pembelajaran termasuk buku ajar, untuk melihat lebih tajam terhadap seluruh aspek pokok dan sasaran penelitian.

¹⁵ Suwandi, *Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Kesehatan Melalui Program “Mawar Iteng” Di Kabupaten Pematang* (Prosiding SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 2019), 596.

¹⁶ Dini Damayanti & Fitria Rismaningtyas, *Pendidikan Berbasis Responsif Gender Sebagai Upaya Meruntuhkan Segregasi Gender* (Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2021, 10 (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan):60

*Ambawati Ambarwati dan Aida Husna melakukan penelitian dengan judul Manajemen Pesantren Responsif Gender : Studi Analisis Di Kepemimpinan Nyai Pesantren Di Kabupaten Pati. Penelitian ini menemukan bahwa masih ditemukan Ketidaksetaraan gender di lembaga pendidikan Islam. Ketidak setaraan gender ini menurutnya karena pengaruh bias gender yang ada dalam kajian kitab kuning. Bahwa masih ada stigma *second class* pada perepuan. Ambawati mengatakan dibutuhkan peran sentral Nyai/Kyai sebagai pimpinan pesantren dalam pengembangan pola pembelajaran responsif gender.*¹⁷

Kajian penelitian terdahulu di atas secara spesifik akan berbeda dengan kajian penulis yaitu pada aspek peningkatan IPM melalui pendidikan dengan pendekatan responsive gender yang nantinya penulis akan kaji secara pustaka dengan memanfaatkan teori kesetaraan gender yaitu *equity in education* atau keadilan dalam mendapatkan pendidikan dengan spirit *education for all*. Dan beberapa buku pendidikan responsive gender lainnya.

Pendidikan untuk Semua

Education for all artinya pendidikan harus didapatkan oleh semua orang dengan adil. Keadilan dalam pandangan Abdurrahman Wahid adalah salah satu nilai moderasi Islam.¹⁸ Secara etimologi ada sedikit perbedaan arah antara (*equity*) (*equality*) menurut Joseph Levitan¹⁹ kesetaraan dengan merujuk terminology *equity* adalah kesetaraan yang berbicara tentang keadilan (*fairness*) adalah untuk memastikan seorang anak mendapat kesempatan yang sama. Sedangkan kesetaraan dengan merujuk pada terminologi *equality* untuk membicarakan kesamaan (*sameness*) jadi mempromosikan keadilan dengan memberikan anak sesuatu yang sama.²⁰

Dalam teori *equity in education* responsif gender peneliti akan menggunakan konsep Kathleen Lynch dan John Baker²¹ yang teruji konsep ini dalam proses

¹⁷ Ambawati Ambarwati & Aida Husna, *Manajemen Pesantren Responsif Gender : Studi Analisis Di Kepemimpinan Nyai Pesantren Di Kabupaten Pati* (*Palastren : Jurnal Studi Gender*, Vol 7, No 2, 2014), 255.

¹⁸ Muhammad Aqil, *Nilai-nilai humanism dalam dialog antar agama perpektif Gus Dur* (Al-Adyan : *Journal of religious studies* 1 (1), 52-66, 2020), 52

¹⁹ *PhD candidate in Educational leadership and comparative at Penn state.*

²⁰ Joseph Levitan, *The difference between educational equality, equity and justice* (Aje Forum, Forum of American Journal of education), 32

²¹ Kathleen Lynch dan John Baker, *Equality in education: An equality of condition perspective* (*Equality Studies Centre, University College Dublin*. 2005), 131

pembelajaran dalam rangka mencapai lembaga pendidikan yang egalitarian dan menganut responsif gender setidaknya memerhatikan hal yang mendukung kepada keadilan dalam pendidikan pertama adalah *equity in education* harus memerhatikan aspek kesamaan dalam penghormatan dan rekognisi terhadap manusia (*equality of respect and recognition*) kemudian yang kedua adalah kesetaraan dalam kemampuan/kekuasaan (*equality of power*) kemudian kesetaraan dalam mendapatkan rasa kasih sayang (*equality of love*), yaitu rasa saling peduli dan solidaritas. Bentuk kesetaraan tersebut di atas dapat memberikan akses mendapatkan kesetaraan dalam proses pembelajaran (*equality of learning*).²²

Selain konsep dan teori konsep Kathleen Lynch dan John Baker, akan dikembangkan juga pada teori lainnya yaitu konsep Onate dan Gruber, pada tahun 2008 mereka membuat konsep tentang akses pendidikan dalam diversitas masyarakat, dan mengajukan konsep *equity* yaitu *opportunity or legally recognised rights*, setiap siswa memiliki hak yang sama secara yuridis dalam layanan dan akses pendidikan di sekolah, yang kedua, *access to school*, akses berangkat ke sekolah yang ketiga *treatment or educational models and measures*, adalah pelayanan atau model dan arah pendidikan dan *results or opportunity for success*, yaitu hasil atau kesempatan untuk sukses.²³

UNESCO menyatakan *every learners matters and matters equally* pesan ini seharusnya menjadi responsibilitas dan kometmen moral bagi pemangku kebijakan tentang pendidikan.²⁴ *Equity in education* harus menjamin keadilan (*fairness*) dalam pendidikan, bahwa peserta didik memiliki hak yang sama dalam layanan pendidikan.²⁵ Maka dalam menegakkan pola *equity in education* setidaknya harus dilakukan oleh pemerintah, dan system pendidikan serta para guru sebagai pelaksana.

Sesuai dengan pernyataan OECD²⁶ bahwa untuk mengembangkan pendidikan berkeadilan dapat dilakukan melalui tiga domain kebijakan disain sistem pendidikan, praktek di dalam kelas dan di luar kelas, dan sumber daya manusi (SDM).²⁷

²² *Ibid*, 131

²³ Luciana Castella, Serena Ragazzia & Alberto Crescentinia, *International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012) Equity in education: a general overview*(*Procedia - Social and Behavioral Sciences* 69 (2012) 2243 – 2250, 2246.

²⁴ UNESCO (united nation, educational, scientific, and cultural organization, *A guide for ensuring inclusion and equity in education* (France : UNESCO, 2017), 12.

²⁵ *Ibid*, 7

²⁶ *organization for economic co-operation and development*

²⁷ OECD (organization for economic co-operation and development), *ten step to equity in education* (OECD; 2008), 2.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Sumenep

Prinsip utama pembangunan manusia adalah memastikan manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki banyak pilihan dalam kehidupannya, menyadari potensi yang ada pada dirinya, dan kebebasan menjalani kehidupan secara terhormat dan berharga.²⁸ Untuk mencapai prinsip utama tersebut, Pendidikan responsif gender menjadi indikator yang tidak dapat diabaikan karena perempuan dan laki-laki merupakan inti dari pembangunan manusia itu sendiri. Kesamaan kesempatan dan peluang, kesetaraan dalam penghargaan dan penghormatan, serta keseimbangan dalam partisipasi dan representasi harus terefleksi pada seluruh aspek pembangunan. Perempuan dan laki-laki sama-sama penting untuk diperhitungkan sehingga sama-sama dapat berperan, terlibat, dan berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya. Realitas pembangunan manusia di Sumenep masih terus diperjuangkan untuk mencapai harapan terbaiknya. Pemenuhan hak dasar manusia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih terus menjadi prioritas utama. Kesenjangan capaian pada perempuan dan laki-laki yang masih dijumpai menjadi landasan arah pembangunan manusia ke depan. Tantangan pembangunan manusia di Sumenep masih dihadapkan pada persoalan struktural dan kultural. Secara struktural, keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan gender masih perlu diperkuat melalui penguatan sistem, perspektif, dan analisis gender para pengambil kebijakan dan pelaksana program. Secara kultural.²⁹

Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Sumenep yang telah dirilis oleh data dan diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2020 menerangkan bahwa komponen IPM kabupaten Sumenep masih relatif rendah yaitu laki-laki berada pada angka 72.32 % sementara perempuan 58.38 % angka ini menggambarkan bahwa masih terjadi perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam IPM. Sementara komponen yang harus diperhatikan dalam laporan IPM ini adalah pada komponen angka harapan hidup, bahwa angka harapan hidup laki-laki di Sumenep lebih rendah dari perempuan yaitu 69.21 % sementara perempuan 73.11 %. Kemudian pada komponen harapan lama sekolah, laki-laki berada pada angka 13.39% dan perempuan pada angka 12.91%. Sementara rata-rata sekolah laki-

²⁸ UNDP, *Gender Equality in Human Development* (Measurement Revisited (2015), 50

²⁹ Ikhliah Muzayyanah Dini, et.al, *Pembangunan manusia berbasis gender 2020* (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020),

laki 6.60 % dan perempuan 4.63%. Kemudian pengeluaran perkapita laki-laki 13.949% sementara perempuan 5.144%. Dari hasil data ini IPM pada perempuan sumenep lebih rendah dari laki-laki yaitu 58.38% sedangkan laki-laki 72.32%. Berikut ini adalah IPM dan komponennya menurut provinsi dan kabupaten tahun 2019.

Tabel 01 : IPM dan Komponennya Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2018/2019³⁰

Kabupaten	Angka harapan hidup		Harapan lama sekolah		Rata-rata lama sekolah		Pengeluaran perkapita		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Sumenep	69,21	73,11	13,39	12,91	6,60	4,63	13,949	5,144	72,32	58,38	80,72

Dengan data di atas menyimpulkan bahwa konstruksi gender masih merugikan salah satu kelompok jenis kelamin, terutama pada perempuan. Menurut penulis budaya patriarki masih terlihat dalam praktik kehidupan masyarakat yang berdampak pada hasil-hasil pembangunan. Stereotip yang terus dikonstruksi berakibat pada posisi perempuan yang secara budaya diposisikan lebih rendah sehingga pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik perempuan. Situasi ini berpengaruh pada proses pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan manusia khususnya di Sumenep.

Di sektor pendidikan, perempuan Sumenep masih tertinggal dari laki-laki (rata-rata sekolah laki-laki 6.60 % dan perempuan 4.63%). Ini Hal ini terlihat pada kepemilikan ijazah tertinggi, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni antara perempuan dan laki-laki belum setara. Kesenjangan ini menjadi persoalan pembangunan dalam bidang pendidikan di Sumenep. Hal ini menunjukkan pentingnya agenda pembangunan manusia di bidang pendidikan yang responsif gender, terutama di wilayah perdesaan dan kepulauan.

Berbagai persoalan ketimpangan gender ini menurut Iklilah dkk terjadi bukan hanya karena pembangunan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan masalah

³⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020),

gender, namun tantangan pembangunan di Sumenep masih dihadapkan pada praktik budaya yang sebagian diantaranya belum berpihak pada kesetaraan gender. Harapan sekolah pada perempuan yang cukup tinggi sulit dipenuhi karena masih terdapat budaya di masyarakat yang menganggap anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, mitos pendidikan menyebabkan perempuan menjadi perawan tua, tabunya Pendidikan tentang seksualitas, dan bahkan karena kondisi ekonomi dan sosial menyebabkan anak perempuan terpaksa harus menikah di usia sekolah.³¹

Dalam teori *equity in education* responsif gender dalam konsep Kathleen Lynch dan John Baker³² kesenjangan gender dalam aspek pendidikan terjadi karena aspek kesamaan dalam penghormatan dan rekognisi terhadap manusia (*equality of respect and recognition*) tidak terwujud, kemudian yang kedua adalah kesetaraan dalam kemampuan/kekuasaan (*equality of power*) kemudian kesetaraan dalam mendapatkan rasa kasih sayang (*equality of love*), yaitu rasa saling peduli dan solidaritas. Bentuk kesetaraan tersebut di atas dapat memberikan akses mendapatkan kesetaraan dalam proses pembelajaran (*equality of learning*).³³

Dalam pembangunan manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan. Kesenjangan gender yang masih terlihat, terutama di bidang pendidikan, harus direspon melalui langkah dan tindakan kongkrit dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Reformasi di bidang hukum, sistem dan budaya di masyarakat dilakukan secara simultan agar berbagai diskriminasi gender dapat dihentikan, terutama pada perempuan. Pembatasan atau pengurangan pada akses, peluang, dan pilihan pada perempuan berpengaruh pada tingkat partisipasi dan kontrol perempuan dalam memajukan kapasitas dan potensi dirinya. Akibatnya, kemajuan yang dicapai perempuan menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki.³⁴ Komitmen pemerintah Sumenep dalam memastikan pembangunan manusia Indonesia berbasis gender diperkuat melalui turut sertanya pemerintah dalam memenuhi target pembangunan di tingkat kabupaten.

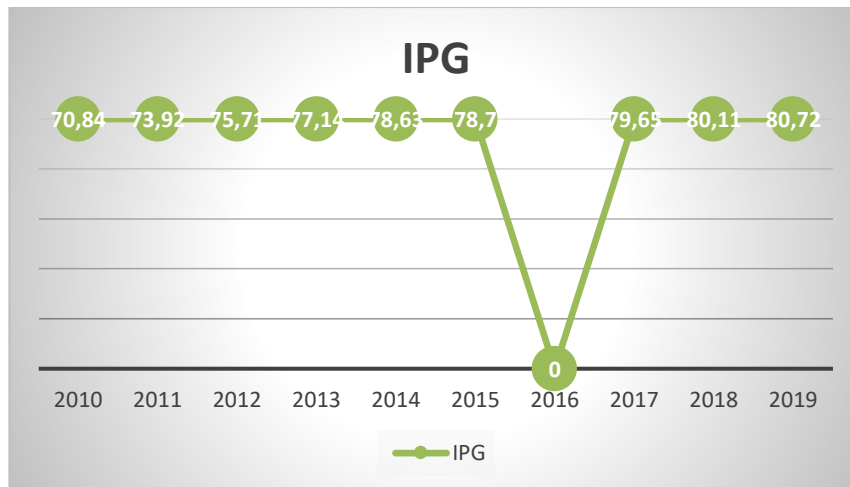
Indek IPG kabupaten Sumenep dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini :

³¹ Iklilah Muzayyanah Dini, et.al, Pembangunan manusia berbasis gender 2020 (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020), 89.

³² Kathleen Lynch dan John Baker, *Equality in education: An equality of condition perspective* (Equality Studies Centre, University College Dublin. 2005), 131

³³ *Ibid*, 131

³⁴ *Ibid*



Indek Pemberdayaan Gender (IDG) di Sumenep

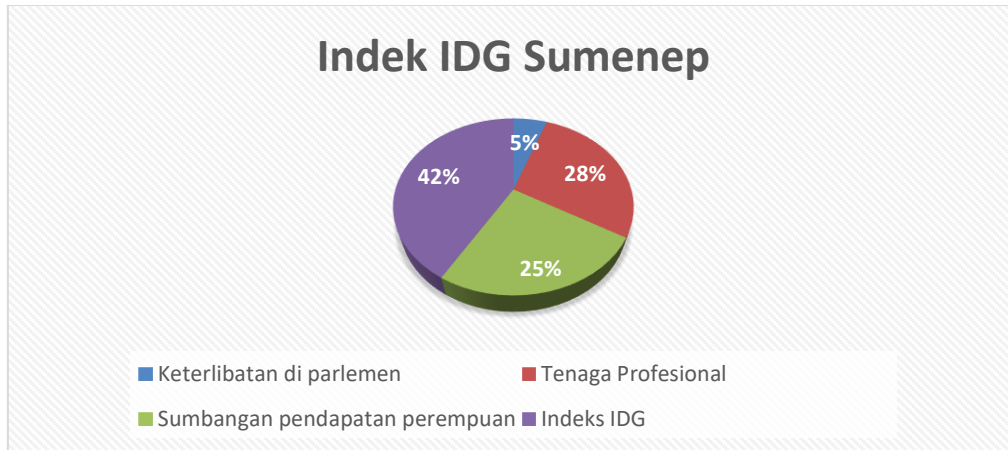
Indek Pemberdayaan Gender adalah dalam pembangunan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski samasama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG yang telah dibahas pada bab sebelumnya. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender yang dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi; sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.³⁵

Keterlibatan perempuan di Parlemen di kabupaten Sumenep berada pada angka yang cukup baik yaitu 8.00% lebih baik dari kabupaten lainnya di Madura yang masing-masing berada di angka 6.00% . Hal ini menunjukkan peran serta perempuan Sumenep pada kontestasi politik yang lebih baik dari kabupaten lainnya di Madura. Kemudian pada komponen perempuan sebagai tenaga professional, perempuan Sumenep berada pada angka 41.25 % angka ini bila dibandingkan dengan angka capaian di kabupaten lainnya di Madura masih relative rendah, angka tertinggi di kabupeten lainnya berada pada angka 43.53. Sementara pada komponen sumbangan pendapatan perempuan, sumenep berada

³⁵ Ibid, 97.

pada angka 36.60% lebih tinggi dari kabupaten lainnya di Madura. Dengan demikian indeks pemberdayaan Gender (IDG) di Sumenep adalah 60.99% lebih baik dari kabupaten lainnya di Madura. Berikut ini adalah gambar indeks IDG Sumenep :

Gambar 02 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumenep³⁶



Tabel 02 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumenep³⁷

Kabupaten	Keterlibatan perempuan di parlemen	Perempuan sebagai tenaga profesional	Sumbangan pendapatan perempuan	Indek pemberdayaan gender
Sumenep	8,00	41,25	36,60	60,99

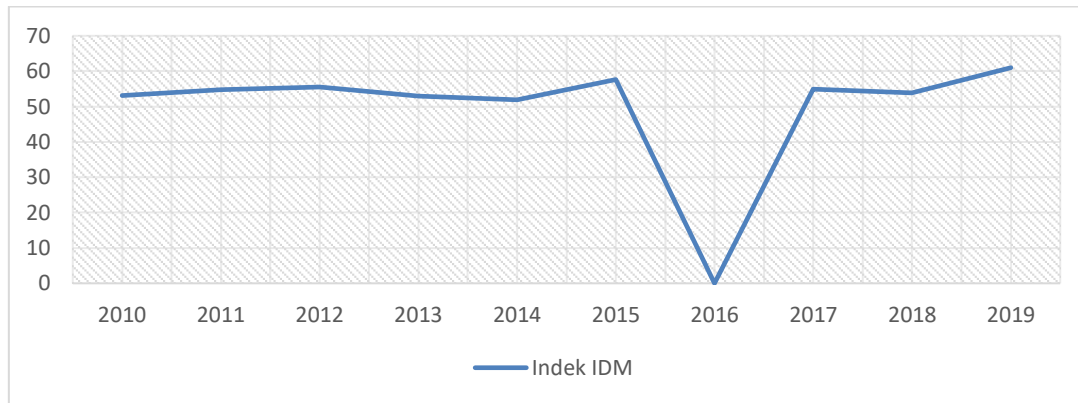
IDG di Sumenep memang unggul bila dibanding dengan kabupaten yang ada di Madura namun bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa timur, IDG sumenep masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan sehingga keterwakilan perempuan di parlemen berdampak pada akses, peluang, kesempatan, partisipasi, perlindungan dan penikmatan manfaat pembangunan yang adil dan merata. Tanpa adanya kontribusi perempuan di bidang politik, maka proses-proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik lebih sulit dicapai karena pengalaman dan kebutuhan perempuan lebih mudah disuarakan dan diperjuangkan oleh wakil dari perempuan. Dengan demikian, persentase perempuan di parlemen menunjukkan adanya kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan dan dapat dimaknai sebagai bukti adanya

³⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020),

³⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020).

keberdayaan perempuan di bidang politik.³⁸ Berikut ini adalah gambar skema IDG dari tahun ketahun:

Skema 01 : Indek Pemberdayaan Gender Sumenep dari tahun 2010-2019³⁹



Dari gambar *skema* di atas terlihat bahwa data IDG Sumenep dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang cukup baik, bahkan lebih baik dari kabupaten lain di Madura. namun bila dibandingkan dengan kabupaten lain di luar Madura, Sumenep dalam konteks pemberdayaan gender masih perlu ditingkatkan hingga dapat berkompetisi dengan kabupaten lain seperti Kediri 84,46%. Data statistic ini dapat membantu pemerintah dalam mengambil strategi jitu sehingga mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.⁴⁰

SDGs memuat 17 tujuan yang terbagi ke dalam 169 target. Pembangunan berbasis gender tercantum secara eksplisit dalam tujuan ke-5, “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan dan Anak”. Adanya tujuan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan SDGs menguatkan urgensi kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. Kemajuan suatu negara tidak dapat dicapai tanpa adanya

³⁸ Ikiliah Muzayyanah Dini, et.al, Pembangunan manusia berbasis gender 2020 (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020), 102.

³⁹ Sumber Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020),

⁴⁰ Ikiliah Muzayyanah Dini, et.al, Pembangunan manusia berbasis gender 2020 (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020)

kesetaraan gender. Hal ini tampak menjadi kesadaran seluruh bangsa yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk memastikan segala diskriminasi berbasis gender harus diakhiri agar kemajuan negara melalui pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.⁴¹

Pada tujuan ke-4, terdapat lima target yang terkait erat dengan kesetaraan gender, yaitu 1) menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif, 2) menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar, 3) menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas, 4) menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan, dan 5) menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.⁴²

Peran Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan Kabupaten juga memiliki peran penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tersebut dengan aktif menjadi pengawas dan mendukung pemerintah melakukan kajian dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menjaga mutu pendidikan di daerah termasuk peningkatan pendidikan pada aspek perempuan.⁴³

Melihat fakta empirik di atas, dewan pendidikan kabupaten dapat mengambil peran sebagai penyampai aspirasi masyarakat, melakukan audiensi dan memberikan masukan kepada pemerintah termasuk juga mengawasi proses layanan pendidikan yang

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ Hendarman, *Peran Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan* (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012), 35.

ada di daerahnya. Karena menurut Hendarman dewan pendidikan memiliki tujuan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dan vital. Peran tersebut adalah: 1) memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; 2) memberikan dukungan (*supporting agency*) baik pemikiran, tenaga, maupun finansial dalam penyelenggaraan pendidikan; 3) mengontrol (*controlling agency*) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan bermutu; dan 4) memediasi (*mediating agency*) antara pemerintah (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) dengan masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, 35.

Penutup

Konstruksi gender masih merugikan salah satu kelompok jenis kelamin, terutama pada perempuan. Di sektor pendidikan, perempuan Sumenep masih tertinggal dari laki-laki (rata-rata sekolah laki-laki 6.60 % dan perempuan 4.63%). Kesenjangan ini menjadi persoalan pembangunan dalam bidang pendidikan di Sumenep. Hal ini menunjukkan pentingnya agenda pembangunan manusia di bidang pendidikan yang responsif gender, terutama di wilayah perdesaan dan kepulauan. Tantangan pembangunan di Sumenep masih dihadapkan pada praksis budaya yang sebagian diantaranya belum berpihak pada kesetaraan gender. Harapan sekolah pada perempuan yang cukup tinggi sulit dipenuhi karena masih terdapat budaya di masyarakat yang menganggap anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, mitos pendidikan menyebabkan perempuan menjadi perawan tua, tabunya Pendidikan tentang seksualitas, dan bahkan karena kondisi ekonomi dan sosial menyebabkan anak perempuan terpaksa harus menikah di usia sekolah.

Pemerintah Sumenep seyogyanya dapat meningkatkan indek pembangunan manusia melalui jalur pendidikan responsive gender, dengan menjadikan kajian ini sebagai rekomendasi kepada seluruh dinas terkait. Salah satunya adalah merevitalisasi peran dewan pendidik, yaitu mengoptimalkan fungsi dewan pendidikan sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency*, dan *mediating agency*.

Daftar Pustaka

- Ambarwati & Aida Husna, Manajemen Pesantren Responsif Gender: Studi Analisis Di Kepemimpinan Nyai Pesantren Di Kabupaten Pati *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol 7, No 2, 2014), 255.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016), Indeks Pembangunan Manusia 2012-2014. BPS, Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016), Indeks Pembangunan Manusia 2016. BPS, Jawa Timur
- Dini Damayanti & Fitria Rismaningtyas, *Pendidikan Berbasis Responsif Gender Sebagai Upaya Meruntuhkan Segregasi Gender* (Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2021, 10 (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan):60
- Hendarman, *Peran Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan* (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012), 35.
- <https://mediamadura.com/2017/01/17/mengejutkan-indek-pembangunan-manusia-di-sumenep-terendah-di-jawa-timur/>
- <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/332880/genjot-pembangunan-sumenep-bupati-fauzi-bidik-sektor-pendidikan>
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/22/nadiem-makarim-perempuan-lebih-rentan-putus-sekolah-di-masa-pandemi-covid-19>.
- Iklilah Muzayyanah Dini, et.al, *Pembangunan manusia berbasis gender 2020* (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020), 55.
- Ismi Aulil Wardani, et.all, *Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Bertahan Hidup Perempuan Pulau Di Desa Gedugan, Pulau Giligenting, Kabupaten Sumenep* (SEPA : Vol. 16 No.1 September 2019), 50.
- Jeseph Levitan, *The difference between educational equality, equity and justice* (Aje Forum, Forum of American Journal of education), 32
- Kathleen Lynch dan John Baker, *Equality in education: An equality of condition perspective* (Equality Studies Centre, University College Dublin. 2005), 131
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2020),
- Luciana Castella, Serena Ragazzia & Alberto Crescentinia, *International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012) Equity in education: a general overview*(*Procedia - Social and Behavioral Sciences* 69 (2012) 2243 – 2250, 2246.
- Muhammad Aqil, *Nilai-nilai humanism dalam dialog antar agama perpektif Gus Dur* (Al-Adyan : Journal of religious studies 1 (1), 52-66, 2020), 52
- OECD (organization for economic co-operation and development), *ten step to equity in education* (OECD; 2008), 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan khususnya dalam pasal 192 ayat (2), (3), (4), dan (5). Ayat (2).

Suwandi, *Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Kesehatan Melalui Program “Mawar Iteng” Di Kabupaten Pemalang* (Prosiding SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 2019), 596.

UNDP, *Gender Equality in Human Development* (Measurement Revisited (2015), 50
UNESCO (united nation, educational, scientific, and cultural organization, *A guide for ensuring inclusion and equity in education* (France : UNESCO, 2017), 12.

Widharto, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional Indonesia: Peran-serta Pustakawan Dalam Mencerdaskan Bangsa* (Jurnal Perpustakaan Pertanian, Vol. 14 No.3 & 4 Tahun 2007), 154.